

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah itjima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT.

Perkataan wakaf yang menjadi Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk mashdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il waqafa. Kata kerja atau fi'il waqafa ini adakalanya memerlukan objek (muta'addi) dan adakalanya memerlukan objek (lazim). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim waqaf ialah habs waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Untuk mengatur perwakafan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
Ste e I am n U n e r s i t y o f S u l t a n M a r i a n S a b i t R i a u

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.<sup>2</sup>

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaftanah dan uang belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini memerlukan penanganan profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang dakwah Islamiyah.

Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : PilarMedia, 2005, hal. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapatkan perhatian.<sup>3</sup>

Di dalam suatu masyarakat pasti terdapat suatu susunan yang mengatur dan mempunyai norma-norma dengan disertai sanksi-sanksi sebagai jaminan agar masyarakat tertib mematuhi sehingga hubungan manusia dengan tanah benar-benar memperoleh kedudukan yang amat penting. Di Indonesia, masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting, hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang lebih lanjut lagi diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan. Salah satu masalah keagamaan yang menyangkut hukum pertanahan adalah masalah perwakafan tanah milik wakaf adalah suatu lembaga keagamaan. yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual guna menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Di samping itu dalam agama Islam-pun wakaf merupakan salah satu ibadah yang menduduki pahala yang amat penting. Hal ini didasarkan pada pahala

---

<sup>3</sup> Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Cet 1, Yogyakarta : Liberty : 1977, hal. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf yang terus menerus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai pemanfaatan benda wakaf biasanya digunakan untuk tempat umum. Benda wakaf itu berupa tanah dan biasanya digunakan untuk mendirikan masjid, mushola, sekolah, yayasan, rumah sakit.<sup>4</sup>

Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negative akibat kurang jelasnya status wakaf. Untuk wakaf tanah, penataannya dimulai oleh pemerintah dengan mengeluarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap penerbitan perwakafan di Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhi, Iradatuhu, Tanmiyatuhu*, Damasyq Syurriah: Dar Al Fikr, 2006, hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW".<sup>7</sup>

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya)

<sup>7</sup> Al-SHaukani, *Nail Al Author*, Jilid VI, Beirut: Dar Al Fikr, hal. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.<sup>8</sup>

Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik(sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”.<sup>9</sup>

Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkanrumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin.

---

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan pengelolaan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.<sup>10</sup>

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam sebagian besar masyarakat melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham keagamaan yang menganut paham Imam Syafi'i dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah SWT.<sup>12</sup>

Paham masyarakat Indonesia tersebut sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-masa awal. Praktik melaksanakan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.<sup>13</sup>

Padahal kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para Mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para Ulama sepakat bahwa Wakif harus menunjukkan Nadzir wakaf yang mampu baik bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan Nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing: Jakarta, 2007,

<sup>13</sup> Ibid,

<sup>14</sup> Ibid,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain problematika diatas, salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan rill dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan *Nadzir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan *Nadzir* itu sendiri dipengaruhi diantaranya oleh masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf, lemahnya sumber daya manusia *Nadzir* wakaf, lemahnya kemauan para *Nadzir* wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak *Nadzir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Naifnya lagi, diantara sekian banyak *Nadzir* di tanah air ada yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.

Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi pemerintah yang menangani wakaf, baik itu dari pengelolaan harta wakaf, sosialisasi wakaf, pengembangan wakaf, sampai kepada masalah pembinaan *Nadzir* wakaf yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Jika dilihat dari potensi wakaf yang ada di Kota Tanjung Pinang, bisa dikatakan sangat banyak sekali. Sebagai contoh di tahun 2014 untuk tanah wakaf di kota Tanjung pinang mencapai 1.486.964,16 H.<sup>15</sup> Jika dikelola serta dimanfaatkan dengan baik, bukan mungkin harta wakaf tersebut akan sangat berperan dalam kehidupan beragama di kota Tanjung Pinang ini.

<sup>15</sup>Data Tanah Wakaf Tahun 2014 di Kantor Kementerian Agama Kanwil tanjung pinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: Sistem Pengelolaan Harta wakaf tanah oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem adalah suatu kesatuan (unity) yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-bagian yang berbeda-beda ( diverse) yang masing-masing terikat pada (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>16</sup>
2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan. Pengelolaan harta wakaf adalah mengumpulkan atau menghimpun sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>17</sup>
3. Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor

<sup>16</sup> Simatupang, *Webster's Third New Colligate Dictionary*, 1995,

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta, 2007

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan harta wakaf tanah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta wakaf tanah oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat tentang pengelolaan harta wakaf tanah di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan harta wakaf tanah guna untuk kemaslahatan umat islam.

- b. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I, PENDAHULUAN**

Bersisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II, KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bersisi tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

### **BAB III, METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknis analisis data.

### **BAB IV, GAMBARAN UMUM**

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, yaitu mengenai sejarah, visi dan misi, tema kerja, moto kerja, sifat kerja, fungsi, wilayah, dan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai wakaf tanah di Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam pengumpulan harta wakaf tanah di Kota Tanjung Pinang.

**BAB VI, PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau .